

Pelatihan Penulisan *News Release* untuk Pranata Humas pada Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak

Rizkiya Ayu Maulida¹, Vinta Sevilla²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jalan RS. Fatmawati No. 1, DKI Jakarta 12450

e-mail: *¹rizkiya.maulida@upnvj.ac.id, ²vintasevilla@gmail.com

Abstrak

Pada era keterbukaan informasi, website merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengkomunikasikan program dan kinerja mereka kepada publik, Tak terkecuali pada pemerintah daerah dimana yang menjadi sasaran dari kegiatan komunikasi publik adalah masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Pada pemerintah Kabupaten Lebak, kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi tersebut sudah ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya website milik 34 OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) pada lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak yang sudah dikelola dengan baik. Pada masing-masing website OPD, sudah ada fitur artikel dimana pemerintah memberitakan peristiwa yang terkini yang terjadi di Kabupaten Lebak. Akan tetapi, penulisan artikel tersebut masih memiliki beberapa ruang untuk perbaikan, seperti format penulisan artikel yang harus memenuhi kaidah jurnalisme, pengkategorisasian jenis tulisan dan frekuensi mengunggah artikel. Atas dasar permasalahan tersebut, maka diadakan pelatihan bagi pengelola website dan pranata humas di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, mengenai teknik penulisan news release dan pengelolaan konten website. Pelatihan dilakukan secara daring, dimana pemateri menyampaikan materi melalui video konferensi kepada peserta, yang kemudian diikuti oleh penugasan secara mandiri. Tugas yang dikumpulkan peserta kemudian diberikan masukan oleh pemateri. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memiliki tingkat kemampuan menulis yang berbeda, sehingga masih membutuhkan pendampingan secara jangka panjang.

Kata kunci—*humas pemerintah, keterbukaan informasi publik, website.*

1. PENDAHULUAN

Media digital merupakan salah satu saluran komunikasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia, yaitu sebesar 80% jumlah penduduk Indonesia [1]. Jumlah yang besar tersebut menyebabkan lembaga pemerintah harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan menggunakan media masyarakat Indonesia, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima oleh audiens yang dituju. Selain itu, media digital memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh media konvensional, yaitu kemudahan untuk melakukan proses komunikasi dua arah, efisiensi serta tidak terbatas ruang dan waktu.

Penggunaan media digital sejalan dengan instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo pada Konvensi Humas tahun 2018 [2]. Pada pertemuan yang dihadiri oleh praktisi humas dari seluruh Indonesia tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh humas untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru, yaitu menggunakan platform digital sebagai kanal untuk menyampaikan informasi. Selain itu, Presiden juga memberi arahan kepada para humas pemerintah untuk mampu menciptakan interaksi yang dialogis atau dua arah antara lembaga pemerintah maupun publik. Interaksi yang dialogis antara pemerintah

kepada publik ini penting mengingat lembaga pemerintah merupakan lembaga yang ditugaskan untuk melayani kepentingan publik.

Hubungan yang dialogis antara lembaga pemerintah dengan publik ini sesuai dengan model *two-symmetrical ways of communication* yang dikemukakan oleh Grunig dan Hunt pada tahun 1995. Berdasarkan interaktivitasnya, ada empat model komunikasi dalam kehumasan, yaitu *press agency*, *public information*, *two-asymmetrical ways of communication* dan *two-symmetrical ways of communication* [3]. Model *two-symmetrical ways of communication* adalah model yang menekankan pada hubungan yang setara dan dua arah antara organisasi dengan publik. Model tersebut paling tepat untuk ditetapkan pada badan publik atau organisasi pemerintah di Indonesia yang sedang mengembangkan hubungan demokratis antara pemerintah dengan masyarakat.

Selain membangun relasi dialogis atau hubungan dua arah, humas pemerintah juga dituntut untuk bersikap transparan, dengan cara untuk mempublikasikan program, kebijakan dan kinerja yang dilakukan pemerintah. Hal tersebut dilaksanakan sebagai langkah akuntabilitas terhadap masyarakat. maka masyarakat dapat mengetahui bahwa pemerintah sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun meningkat.

Transparansi pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 (Undang-Undang No. 14 tahun 2008). Undang-undang tersebut mengatur kewajiban badan publik untuk memberikan transparansi informasi kepada masyarakat. Badan publik dalam hal ini adalah segala lembaga yang memiliki fungsi penyelenggaraan negara, dimana dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. UU No. 14 tahun 2008 dibuat atas dasar pemahaman bahwa mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia, sehingga diperlukan undang-undang yang mengatur khusus penyediaan informasi bagi publik.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilakukan melalui pemaksimalan tugas humas pemerintah. Humas pemerintah diberdayakan untuk mengelola, menciptakan konten, mengevaluasi dan melakukan monitoring media. Selain itu, petugas humas juga bertugas sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lebak merupakan salah satu pemerintah daerah yang menggunakan media digital sebagai alat untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki sistem online terintegrasi yang berisi tautan-tautan penting yang dibutuhkan oleh masyarakat Lebak, seperti Sistem Informasi Kabupaten Lebak, Sahate, PPID (Pusat Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi). Selain itu, terdapat website dari masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah), berjumlah 34 lembaga, yang membawahi bidang-bidang tertentu, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informasi, dan lain-lain.

Tim abdimas melakukan observasi terhadap website masing-masing lembaga tersebut. Salah satu situs yang menjadi obyek observasi adalah lebakkab.go.id. Selain berisi profil mengenai Kabupaten Lebak serta informasi berupa data statistik yang dibutuhkan oleh masyarakat, situs Pemerintah Kabupaten Lebak juga memiliki fitur yang berisi berita mengenai perkembangan dan berita yang terbaru di Kabupaten Lebak. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan tim abdimas, terlihat bahwa *news release* diunggah dengan frekuensi yang tidak teratur. Selain itu, tulisan yang ada belum memenuhi kaidah yang berlaku. Tim abdimas juga melakukan pengamatan terhadap berbagai situs OPD yang ada, dari situ tim abdimas menyimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi dan pemahaman mengenai pengelolaan website diantara masing-masing OPD. Dengan kata lain, perlu adanya penyamarataan persepsi, pemahaman dan keterampilan untuk mengelola website antara masing-masing OPD, terutama pada OPD yang memiliki bidang kerja yang tidak terkait dengan informasi dan publikasi. Pada masing-masing OPD, perlu ditanamkan pemahaman bahwa mempublikasikan kinerja serta menjalankan hubungan komunikasi dua arah dengan masyarakat merupakan kewajiban, tanpa terbatas bidang kerja OPD yang terkait.

Ibarat sebuah rumah, website merupakan halaman depan sebuah institusi. Website yang dikelola dengan baik akan meningkatkan reputasi institusi tersebut di mata masyarakat. Disamping itu, website juga menjadi salah satu acuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan institusi terkait, termasuk pada bidang yang dikelola oleh institusi tersebut.

Maka dari itu, sudah sewajarnya jika website dari lembaga pemerintah dikelola dengan profesional. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari komitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tim abdimas UPN Veteran Jakarta mengadakan kegiatan pelatihan menulis *news release* dan mengelola konten website untuk petugas humas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lebak. Pada kegiatan tersebut, kami menggandeng Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lebak sebagai mitra. Salah satu kunci pengelolaan website terletak pada keterampilan, wawasan serta *mindset* yang dimiliki oleh petugas humas pada instansi terkait. Oleh karena itu, kegiatan ini melibatkan petugas humas dan pengelola website dari masing-masing OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lebak. Keterlibatan petugas humas dari lintas OPD merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas humas pemerintah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lebak dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik.

2. METODE

2.1 Assessment awal

Tim Abdimas melakukan assement dengan melakukan observasi pada situs lebakkab.go.id dan 34 OPD yang ada di Kabupaten Lebak. Hal-hal yang diobservasi, antara lain adalah penulisan konten, cara pengorganisasian dan frekuensi dari pengunggahan konten.

2.2 Ceramah/Pemberian materi

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep dan pelatihan bagaimana cara untuk menuliskan news release, namun sebelum dilaksanakannya metode ini, terlebih dahulu peserta diberikan *pre-test* untuk mengukur seberapa jauh pemahaman mereka terhadap penggunaan website. Sehingga pada akhir kegiatan peserta dapat diketahui bagaimana perkembangan pengetahuan/ kognitifnya dalam memanfaatkan website.

2.3 Latihan / Praktik Menulis *News Release*

Pemilihan metode ini bertujuan agar peserta secara langsung dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat melalui pelatihan. Pada sesi ini, peserta diberikan pilihan untuk menulis *news release* atau tulisan berita berdasarkan peristiwa yang terjadi di OPD masing-masing. Hasil pekerjaan dari peserta tersebut kemudian dikoreksi dan diberikan tanggapan (*feedback*) oleh pemateri secara online.

2.4 Evaluasi

Evaluasi dilakukan berdasarkan tugas yang dikumpulkan oleh peserta sebagai indikator *assessment* untuk mengukur sejauh mana peningkatan keterampilan yang dimiliki peserta setelah mengikuti pelatihan. Dari evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sudah tepat sasaran atau belum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Assesment Awal

Dalam mengunggah informasi bagi publik, Pemerintah Kabupaten Lebak sudah memiliki kesadaran untuk menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Akan tetapi, dalam pelaksanaannya diperlukan perbaikan, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah dan juga rakyat. Dari *assessment* awal yang dilakukan oleh Tim Abdimas UPNVJ, maka kami memetakan masalah menjadi sebagai berikut:

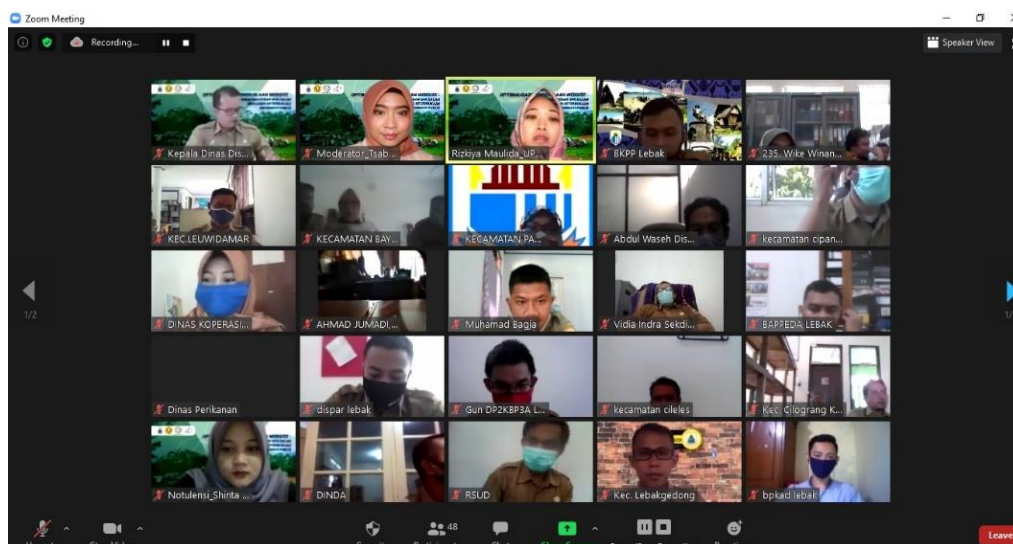
- a. *News release* diunggah admin dengan frekuensi yang tidak teratur. Padahal, idealnya, news release diunggah dengan frekuensi yang teratur, tidak harus menunggu peristiwa yang memiliki news value. Frekuensi pengunggahan yang teratur ini berhubungan dengan tingkat keterbacaan dan kunjungan dari website.

Frekuensi unggahan konten yang konsisten, akan menjaga kelangsungan dari pengunjung website tersebut.

- b. Penulisan *news release* belum menggunakan kaidah jurnalisme yang berlaku, yaitu menggunakan format piramida terbalik, dimana bagian yang paling penting dari peristiwa (*What, Why, Who, Where, When* dan *How*) berada di paragraf pertama. Pada beberapa *news release*, yang tim abdimas amati, penulis belum bisa membedakan antara kategori dan penulisan berita, pengumuman dan opini.
- c. Belum ada pengkategorisasian berita berdasarkan isinya. Idealnya, berita pada website pemerintah dikelompokkan berdasarkan isi dan formatnya. Pada website Pemerintah Kabupaten Lebak, seluruh tulisan dimasukkan ke dalam satu section pada website, yaitu Berita Seputar Kabupaten Lebak. Apabila dimasukkan dalam satu kelompok, maka sebaiknya dikelompokkan berdasarkan isi dengan menggunakan tagar.
- d. *News release* juga tidak mencantumkan nama penulis pada tulisan. Padahal, mencantumkan nama penulis merupakan hal yang mutlak karena menyangkut pertanggungjawaban terhadap informasi yang diberikan.
- e. Belum ada sinkronisasi antara isi website dengan akun sosial media yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebak (Facebook, Instagram dan Twitter). Selain dengan menciptakan konten di website, maka pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa konten sampai kepada sasaran yang dituju, yaitu masyarakat daerah tersebut. Akun sosial media memiliki informasi yang berbeda dengan informasi yang dipublikasikan di website. Untuk memaksimalkan penggunaan new media, seharusnya akun social media dan website menyebarluaskan informasi yang senada, dengan format yang menyesuaikan dengan fitur tiap platform. Selain itu, link berita dapat di-*share* melalui website, sehingga masyarakat tertarik untuk mengunjungi website.

3.2 Ceramah/Pemberian Materi

Kegiatan diadakan pada tanggal 29 September 2020, dengan menggunakan aplikasi Zoom. Pelaksanaan kegiatan ini sedikit berubah dari rencana awal dimana tim abdimas awalnya berencana untuk melaksanakan kegiatan secara luring, dalam bentuk satu hari workshop. Akan tetapi, dengan adanya imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait dengan virus Corona, tim abdimas beserta mitra sepakat untuk mengalihkan metode pelatihan dalam bentuk daring, dimana acara pelatihan disingkat dengan hanya menjadi dua jam, lalu sesi praktik penulisan *press release* yang pada awalnya direncanakan dikerjakan oleh peserta secara *on-the-spot*, pada sesi pelatihan, dialihkan menjadi sesi penugasan mandiri.



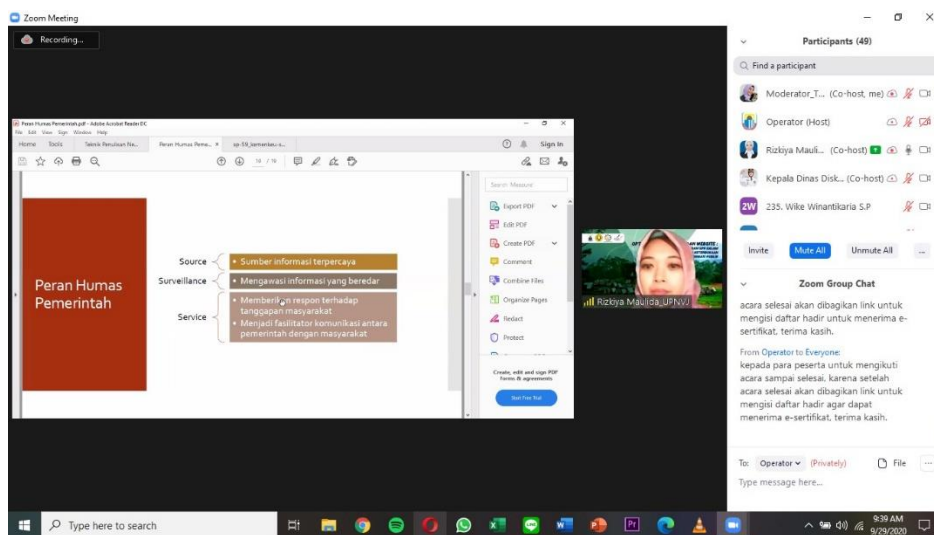
Gambar 1. Foto bersama peserta, panitia dan pemateri

Kegiatan dihadiri oleh 62 peserta dari berbagai OPD dan perwakilan kecamatan di Kabupaten Lebak. Acara dibuka dengan moderator Tsabdany Tzara, kemudian diikuti dengan sambutan sekaligus paparan dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lebak, Doddy Irawan, ST, M.Si, mengenai landasan Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 2. Sambutan dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lebak

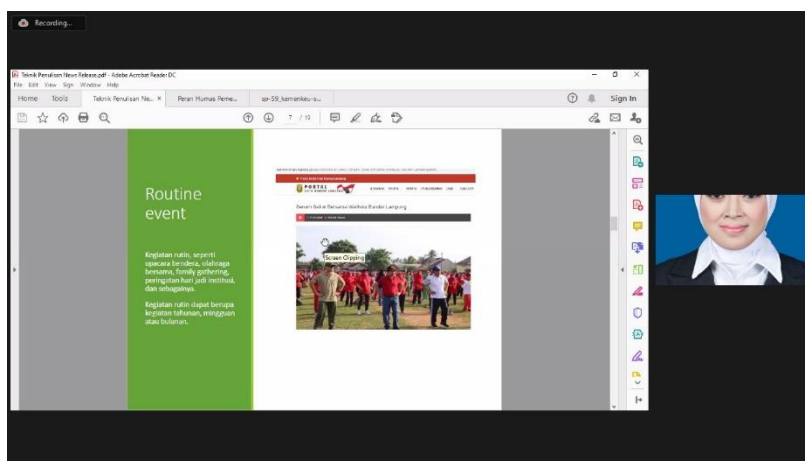
Kemudian, setelah itu, acara diikuti dengan pemaparan materi oleh Rizkiya Ayu Maulida, selaku Tim Pengabdian Masyarakat UPN Veteran Jakarta. Materi dibagi menjadi dua, yaitu Peran Humas dalam Menjalin Keterbukaan Informasi Publik pada Era 4.0 serta Teknik Penulisan *News Release* dan Artikel untuk Website Pemerintah. Pada materi mengenai peran humas pemerintah, Rizkiya menekankan mengenai dasar Keterbukaan Informasi Publik, yaitu UU Keterbukaan Informasi Publik dan Arahan Presiden Joko Widodo pada Konvensi Humas 2018. Berikut hasil tangkapan layar saat pemateri menyampaikan materi pertama:



Gambar 3. Paparan Materi mengenai Peran Humas Pemerintah pada Era Keterbukaan Informasi Publik

Pemateri memberikan pemahaman pada peserta mengenai urgensi penggunaan media digital. Pertama, karena tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia, sehingga menggunakan internet merupakan salah satu cara agar pesan dapat sampai kepada audiens. Kedua, untuk menangkal informasi palsu yang beredar di kalangan masyarakat. Pemateri memberi contoh film Tilik yang menggambarkan realita masyarakat Indonesia yang mudah mempercayai informasi yang beredar, tanpa memeriksa kebenarannya.

Pada sesi yang kedua, pemateri menyampaikan materi mengenai teknik-teknik penulisan *news release* dan artikel. Pemateri menjelaskan bahwa terdapat dua kategori tulisan yang dimuat di website, yaitu *news release* dan artikel. *Press release* dan artikel ditulis dengan struktur yang sama, yaitu piramida terbalik. Selain itu, *news release* dan artikel biasanya berisi hal yang sama, yaitu berita atau peristiwa terbaru terkini yang terjadi di institusi. Hal yang membedakan antara *press release* dan artikel adalah audiens yang dituju. Jika *news release* dikirimkan kepada kalangan pers sebagai referensi bagi wartawan untuk menulis berita mengenai institusi. Sedangkan artikel ditulis untuk dimuat di website institusi, dimana pembaca adalah masyarakat umum. Berikut hasil tangkapan layar saat pemateri menyampaikan materi kedua:



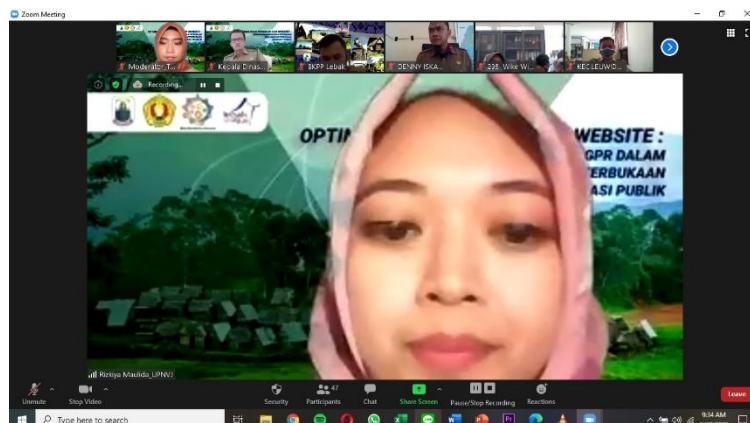
Gambar 4. Materi kedua mengenai Teknis Penulisan News Release

Setelah menyampaikan materi mengenai kaidah penulisan *press release* dan artikel, pemateri mengajak peserta untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa contoh *press release* dan artikel yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Pada kesempatan tersebut, yang menjadi contoh adalah *news release* yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan mengenai pelaksanaan webinar mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta *news release* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi klarifikasi terhadap berita yang kurang sedap mengenai penghapusan mata pelajaran sejarah pada kurikulum sekolah.

Pemateri mengajak peserta untuk mengevaluasi penulisan kedua *press release* tersebut berdasarkan kaidah penulisan *news release* yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti struktur piramida terbalik, kelengkapan unsur 5W+1H serta aktualitas dari berita. Pemateri mengajak peserta untuk mengamati paragraf pertama dari kedua *news release* tersebut, dimana berdasarkan kaidahnya, paragraf pertama seharusnya adalah bagian yang paling padat informasi dari struktur penulisan *news release*. Sesuai dengan fungsi *news release* yang digunakan sebagai acuan bagi wartawan dalam menulis berita mengenai institusi tersebut, pemateri meminta peserta untuk memeriksa keberadaan dari kutipan langsung pada kedua *news release*. Selain itu, pemateri juga mengajak peserta untuk memeriksa kelengkapan unsur dari *news release*, seperti terdapat nama terang dan kontak dari petugas yang bertanggung jawab, mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan serta menggunakan kertas ber-kop institusi. Ternyata, tidak semua *news release* mengikuti seluruh kaidah secara benar, akan tetapi sudah dapat memberikan informasi yang lengkap kepada pembaca. Berikut hasil tangkapan layar saat pemateri mengajak peserta berdialog pada sesi interaktif:

Pemateri meminta peserta untuk mengkategorisasikan *press release* tersebut berdasarkan peristiwa yang ditulis. Menurut Zappala & Carden (2004, p. 108), *press release* terbagi menjadi tiga, yaitu *news release* yang berisi kejadian penting (*significant event*), kejadian rutin (*routine event*) dan kejadian yang kurang baik (*bad news event*). *News release* dari Kementerian Keuangan termasuk ke dalam kategori “*significant event*” atau kejadian penting karena meliputi peristiwa yang tidak terjadi secara rutin. Sedangkan *news release* yang

dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk ke dalam kategori “bad news event karena berusaha memberikan konfirmasi mengenai berita yang tidak sedap.



Gambar 5. Pemateri mengajak peserta mengevaluasi news release

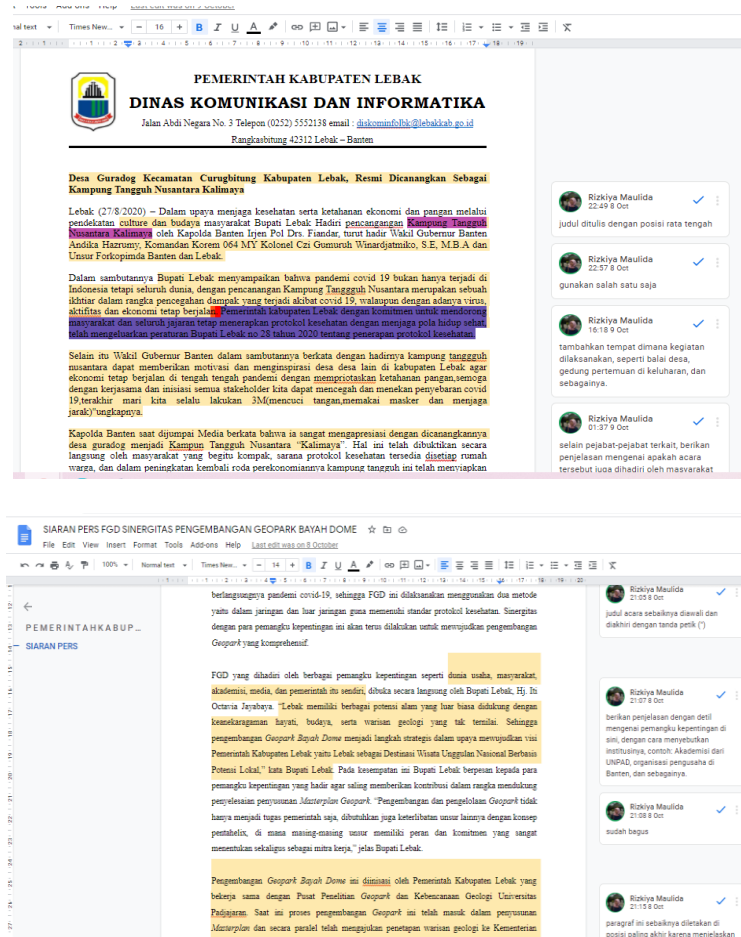
Pemateri juga mengajak peserta mengevaluasi artikel yang dimuat di website milik pemerintah daerah. Website pemerintah daerah sengaja dipilih untuk memberikan perbandingan yang tepat, mengingat website pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki audiens yang berbeda. Pada sesi ini, website Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang menjadi contoh. Website Pemerintah Kabupaten Karanganyar dipilih karena website Pemkab Karanganyar mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten Informatif pada ajang Komisi Informasi Pusat (KIP) Awards 2019, dimana Pemkab Karanganyar meraih posisi tiga [5]. Sedangkan website Pemkab Gunungkidul dipilih karena mendapatkan penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2019 yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA, untuk Kategori Website dengan Pelayaran Inovasi Terinovatif dengan sub-Kategori Pemerintah Daerah, dengan penghargaan Bronze [6].

Dari website Pemerintah Kabupaten Karanganyar, pemateri mencontohkan artikel mengenai pembukaan destinasi wisata, sedangkan dari website Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, pemateri memberikan contoh mengenai kegiatan pelatihan yang dilakukan untuk perwakilan pengurus PKK dalam memberikan sosialisasi mengenai protokol kesehatan terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam hal ini, terlihat bahwa Pemkab Karanganyar menggunakan website untuk memberikan informasi mengenai *significant event* dan juga pengumuman mengenai capaian (*accomplishment*) yang mereka raih. Sedangkan pada Pemkab Gunungkidul, berkaitan dengan *significant event*, yang menunjukkan kinerja pemerintah untuk menangani Covid-19. Pemateri juga mengajak peserta untuk mengkritisi penulisan kedua artikel tersebut secara teknis dan kelengkapan unsur-unsur yang ada, seperti struktur penulisan, adanya kutipan langsung, adanya tanggal dan tempat pembuatan dan sebagainya.

3.3 Pelatihan/Pemberian Tugas

Seusai pemberian materi, peserta diminta untuk langsung mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari pelatihan, yaitu dengan mengerjakan tugas. Peserta diminta memilih antara mengerjakan tugas *news release* atau menulis artikel. Tugas disusun berdasarkan kejadian atau peristiwa terkini yang terjadi pada masing-masing OPD.

Mengingat pelatihan diadakan secara daring, maka peserta mengerjakan tugas secara mandiri, di luar jam pelatihan, untuk dikumpulkan kepada pemateri, pada batas waktu yang telah ditentukan. Tugas yang dikirimkan kepada pemateri kemudian akan diberikan *feedback* (umpan balik) atau masukan oleh pemateri. *Feedback* yang diberikan oleh pemateri diharapkan dapat menjadi masukan bagi peserta dalam meningkatkan keterampilan dalam menulis. Berikut beberapa tugas peserta yang mendapatkan *feedback* dari pemateri:



Gambar 6. Beberapa tugas peserta yang mendapat feedback dari pemateri

Dalam memberikan *feedback*, pemateri menggunakan acuan sebagai berikut:

a. Kaidah penulisan *news release*/artikel

Aspek ini mencakup aturan dasar dari penulisan news release/artikel, seperti struktur penulisan, kelengkapan informasi serta format sesuai aturan. Struktur penulisan pada news release adalah penggunaan struktur piramida terbalik, dimana informasi paling penting berada pada paragraf paling atas, kemudian paragraph-paragraph selanjutnya berisi informasi yang bersifat mengelaborasi informasi yang terletak pada paragraf paling atas. Aspek informasi terkait dengan unsur 5W+1H (*What, Who, Where, Why, When* dan *How*), dimana informasi yang diberikan harus lengkap dari unsur-unsur tersebut. Adapun kelengkapan format adalah adanya unsur-unsur pelengkap seperti tanggal dan tempat pembuatan, keterangan penulis/nama terang dan kontak petugas humas yang terkait, dicetak pada kertas ber-kop institusi, dan sebagainya.

b. Pengorganisasian tulisan

News release/artikel umumnya ditulis dengan panjang 3-5 paragraf, dimana masing-masing paragraf terdiri atas maksimal 5 kalimat. Paragraf pertama berisi informasi pokok dari peristiwa yang ditulis pada *news release*/artikel. Pada paragraf selanjutnya ditulis penjelasan lebih detail mengenai informasi yang terdapat pada paragraph pertama. Paragraf penutup berisi gambaran umum mengenai organisasi atau program yang dilaksanakan.

c. Gaya penulisan

Gaya penulisan terkait dengan pemilihan kata (diksi), penyusunan kalimat dan cara penulis menarasikan peristiwa dan fakta yang terjadi. Gaya penulisan ini

dapat berbeda dari satu penulis dengan penulis lainnya, karena berkaitan dengan selera yang dimiliki oleh tiap individu. Akan tetapi, tulisan yang ditulis dengan gaya penulisan yang baik akan mampu menarik perhatian pembaca.

d. Aspek teknis penulisan

Aspek teknis berkaitan dengan penggunaan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan), cara mengutip yang benar, pemilihan *font*, spasi, serta ada/tidaknya salah ketik.

3.4 Evaluasi

Peserta dievaluasi berdasarkan tugas yang dikumpulkan setelah kegiatan dilaksanakan, dimana tugas tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat bagi peserta. Berdasarkan tugas yang dikumpulkan oleh peserta, pemateri mengkategorikan kemampuan peserta menjadi empat tingkatan, yaitu:

- a. Peserta belum terbiasa menulis dan belum mempraktikkan kaidah penulisan *news release*, sehingga membutuhkan latihan dan pendampingan.
- b. Peserta belum familiar dengan teknik penulisan *news release*, akan tetapi berusaha mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada saat pelatihan, sehingga artikel yang ditulis masih tergolong kaku dalam penulisan. Akan tetapi, tulisan yang dikumpulkan sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga hanya dibutuhkan jam terbang dan latihan yang berulang-ulang agar keterampilan peserta terus terasah.
- c. Peserta yang memiliki kemampuan menulis, tapi belum menerapkan kaidah penulisan *news release* dengan baik. Dalam hal ini, dibutuhkan kesadaran dari peserta untuk mengikuti kaidah yang berlaku, serta pendampingan dari atasan yang berwenang.
- d. Peserta yang sudah memiliki kemampuan menulis *news release* yang baik, sehingga hanya terdapat kesalahan minor pada tugas yang dikumpulkan. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah apresiasi serta kesempatan untuk mengembangkan diri, sehingga peserta tetap berusaha mempertahankan kemampuannya dalam berkarya.

Hasil evaluasi tugas yang dikerjakan oleh peserta kemudian dilaporkan kepada mitra, dalam hal ini, Kabid PTIK, Dinas Kominfo Lebak, untuk kemudian dijadikan arahan untuk pengembangan kualitas SDM pengelola website dan petugas humas pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Lebak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pelatihan yang sudah terlaksana, maka tim abdimas menarik kesimpulan:

1. Secara keseluruhan, pengelolaan kegiatan humas pemerintah daerah memiliki banyak aspek, mulai dari produksi pesan, pengelolaan dan *monitoring*. Apalagi, dengan keberadaan media digital, yang memberi kemudahan informasi untuk mengalir secara dua arah (pemerintah dan masyarakat). Pada kegiatan ini, tim abdimas memutuskan untuk memprioritaskan salah satu aspek, yaitu penulisan *news release* dan artikel untuk website pemerintah daerah. Oleh karena itu, kegiatan abdimas yang mengulas aspek lain dari kegiatan kehumasan pemerintah sangat disarankan.
2. Pentingnya pemahaman bahwa kegiatan humas tidak hanya mencakup aspek teknis saja, seperti menulis dan berbicara, tetapi juga aspek managerial, sehingga mampu menyusun program kehumasan yang sistematis dan tepat sasaran.

5. SARAN

Untuk pengembangan jangka panjang, dibutuhkan tidak hanya pelatihan, namun juga pendampingan. Hal ini disebabkan karena untuk meningkatkan keterampilan, dibutuhkan usaha yang konsisten. Dengan adanya pendampingan, maka akan ada kegiatan *monitoring* dari tim abdimas mengenai peningkatan keterampilan masing-masing peserta. Selain itu, peserta akan lebih mudah mendapatkan bimbingan dari tim abdimas, pada setiap kemajuan yang diraih. Oleh karena itu, tim abdimas berencana meningkatkan kegiatan pelatihan ini menjadi kegiatan pendampingan secara jangka panjang. Dengan begitu, dapat terjadi peningkatan keterampilan secara signifikan dalam hal menulis konten untuk materi kegiatan kehumasan pada peserta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika di UPN Veteran Jakarta atas dukungan secara moril yang diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo Lebak selaku mitra dari kegiatan abdimas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia & Polling Indonesia, “Laporan Survey Penetrasi dan Profil Pelaku Pengguna Internet Indonesia,” Jakarta, 2019.
- [2] Humas, “Paradigma Baru Komunikasi Pemerintah di Era Digital,,” 2018. <https://setkab.go.id/paradigma-baru-komunikasi-pemerintah-di-era-digital/> (accessed May 07, 2020).
- [3] J. E. Grunig, L. A. Grunig, K. Sriramesh, Y. H. Huang, and A. Lyra, “Models of Public Relations in an International Setting,” *J. Public Relations Res.*, vol. 7, no. 3, pp. 163–186, 1995, doi: 10.1207/s1532754xjpr0703_01.
- [4] J. M. Zappala and A. R. Carden, *Public relations worktext: A writing and planning resource: Second edition*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associate, 2004.
- [5] S. S. Handayani, “Mantap! Karanganyar Juara III Kabupaten Terinformatif se-Jawa Tengah 2019,” 2019. <https://www.solopos.com/mantap-karanganyar-juara-iii-kabupaten-informatif-se-jateng-2019-1037573> (accessed Oct. 10, 2020).
- [6] Iprahumas.id, “INILAH DAFTAR PEMENANG AHI 2019,” 2019. <https://iprahumas.id/detailpost/inilah-daftar-pemenang-ahi-2019> (accessed Oct. 27, 2020).